

PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PT WAHANA PRIMA KUSUMA YANG TIDAK DICATATKAN KEPADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SLEMAN

INTISARI

Oleh:

R Rolly Wijayakusuma¹ & Ari Hernawan²

Penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan, pertama adalah mengetahui dan menganalisis upaya pelindungan hukum bagi pekerja PKWT di PT Wahana Prima Kusuma. Tujuan kedua adalah mengetahui dan menganalisis peran pemerintah dalam pelaksanaan pencatatan PKWT.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder atas berbagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan alat berupa studi dokumen. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara studi lapangan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara kepada subjek penelitian dengan alat berupa pedoman wawancara. Hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan, pertama upaya pencatatan PKWT di PT Wahana Prima Kusuma belum dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 14 PP No. 35 Tahun 2021, yang mengakibatkan pekerja tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Kedua peran Dinas Tenaga Kerja sebagai wakil pemerintah untuk melindungi pekerja adalah melaksanakan pengawasan dan membuat nota pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan yang dapat diajukan penetapan melalui lembaga yudikatif yaitu Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga dengan mengoptimalkan peran Dinas Tenaga Kerja dapat tercipta keadilan bagi pekerja dan pengusaha.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Pencatatan PKWT, Pelindungan Hukum, Pengawas Ketenagakerjaan.

¹ Mahasiswa Konsentrasi Hukum Bisnis, Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

² Dosen Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

***LEGAL PROTECTION FOR WORKERS FIXED-TERM WORK AGREEMENTS
(PKWT) OF PT WAHANA PRIMA KUSUMA WHOSE UNREGISTERED TO
THE DINAS TENAGA KERJA SLEMAN***

ABSTRACT

By:

R Rolly Wijayakusuma¹ & Ari Hernawan²

The research study has 2 (two) objectives, the first is to find out and analyze legal protection efforts for PKWT workers at PT Wahana Prima Kusuma. The second objective is to find out and analyze the role of the government in the implementation of PKWT registrations.

The type of research used is descriptive empirical normative. Normative research is conducted by library research to obtain secondary data on various primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials with tools in the form of document studies. Empirical legal research is conducted by means of field studies to obtain primary data by means of interviews with research subjects with tools in the form of interview guidelines. The results of this study were analyzed qualitatively.

The results of the research study conclusion as follows, first efforts to register of PKWT worker at PT Wahana Prima Kusuma have not been implemented in accordance with the provisions of Article 14 of PP No. 35 of 2021, which results in workers have not protection by the government. Second, the role of the Manpower Officer to protect workers is to carry out supervision and make inspection notes of labor inspectors that can be submitted for determination through the judicial institution, by the Industrial Relations Court, so that by optimizing the role of the Manpower Office, justice can be created for workers and employers.

Keywords: *Fixed Term Employment Agreement, Registration of Fixed-Term Contract, Legal Protection, Labor Inspector.*

¹ *Student Concentrating on Business Law, Master of Business Law and State Affairs, Faculty of Law, Gadjah Mada University*

² *Lecturer at the Department of Civil Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University*